

BAB II

PROFIL PROPINSI RIAU

A. Sejarah

Secara etimologi, asal kata Riau terdapat bermacam pendapat, Rio dalam bahasa Portugis dapat bermaksud sungai, dan tercatat pada tahun 1514, ada sebuah ekspedisi militer Portugis dikirim menelusuri sungai Siak dengan tujuan mencari lokasi dari sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan sungai tersebut. Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini disebut dengan Riouw, sementara masyarakat setempat mengejanya menjadi Riau.¹

Sejarah Riau sebelum kemerdekaan lebih diwarnai riwayat kerajaan Melayu Islam, dengan kerajaan terbesarnya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan yang berpusat di Kabupaten Siak ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah pada tahun 1725. Sultan pertama ini meninggal pada tahun 1746 dan kemudian diberi gelar Marhum Buntan. Sepeninggal Marhum Buntan tercatat ada sebelas sultan yang pernah bertahta di Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu:

1. Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah (1746-1765). Dengan memerintah selama lebih kurang 19 tahun, Sultan kedua ini berhasil membangun Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi kokoh dan kuat.
2. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah (1765-1766). Nama aslinya Tengku Ismail, hanya sempat memerintah selama setahun. Masa pemerintahannya datangnya serangan Belanda yang memanfaatkan Tengku Alam (selanjutnya menjadi Sultan ke empat) sebagai perisai. Sultan Abdul Jalil kemudian gugur dan digelari Marhum Mangkat di Balai.

¹ Mukhtar Luthfi dkk, *Sejarah Riau*, (Jakarta: Bulan Bitang, 1979), cet. ke 1, hal. 1. Lihat juga dalam Mini Pedia Propinsi Riau dalam, http://Aldo_Shandy.blogspot.co.id/p/propinsi_riau.html, diakses hari Sabtu, 21 Oktober 2017, hal.1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766-1780). Sepeninggal Marhum Mangkat di Bali, Tengku Alam menduduki tahta kerajaan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Meninggal pada tahun 1780 dengan gelar Marhum Bukit.
4. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzzam Syah(1780-1782). Pada masa pemerintahannya Kerajaan Siak berkedudukan di Senapelan atau Pekanbaru sekarang. Beliau pula yang merupakan pendiri kota' Pekanbaru, sehingga setelah meninggal pada tahun 1782 digelari Marhum Pekan.
5. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (1782-1784). Seperti sultan sebelumnya, Sultan Yahya juga hanya sempat 2 tahun memerintah. Meninggal pada tahun 1784 dan digelari Marhum Mangkat di Dungun.
6. Sultan Assayaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784-1810). Sultan ketujuh ini merupakan Sultan Siakpertama yang berdarah Arab dan bergelar Sayed Syarif Pada masa pemerintahannya Kerajaan Siak mencapai puncak kejayaannya. Meninggal pada tahun 1810 dan digelari Marhum Kota Tinggi.
7. Sultan Assayaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1810-1815). Sultan yang bernama asli Ibrahim ini meninggal pada tahun 1815 kemudian digelari dengan Marhum Mempura Kecil.
8. Sultan Assayaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1815-1854). Nama aslinya tengku Sayed Ismail dan setelah meninggal digelari Marhum Indrapura.
9. Sultan Assayaidis Syarif Kasyim Abdul Jalil Syaifuddin (Syarif Kasyim 1,1864-1889). Meninggal tahun 1889, dan digelari Marhum Mahkota.
10. Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Muzaffar Syah (1889-1908). Atas jasa dan usaha Sultan inilah pembangunan gedung-gedung yang kini menjadi peninggalan Kerajaan Siak. Meninggal pada tahun 1908 dan digelari Marhum Baginda.

11. Sultan Assayaidis Syarif Kasym Abdul Jalil Syaifuddin (Syarif Kasim II, 1915-1949). Sultan yang bernama asli Tengku Sulong ini baru naik tahta setelah 7 tahun ayahandanya Sultan Hasyim meninggal, sekaligus menjadi sultan terakhir Kerajaan Siak Indrapura. Karena pada bulan Nopember 1945, Sultan Syarif Kasim II mengirim kawat kepada Presiden Republik Indonesia yang menyatakan kesetiaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Sultan juga menyerahkan harta bendanya untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.²

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Kota Bukittinggi. Kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tahun 1957, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah kembali dimekarkan atas 3 provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

Propinsi Riau yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1957 dan diundangkan dalam Undang-undang no.61 tahun 1958 dengan wilayah meliputi Bengkalis, Kampar, Indragiri Kepulauan Riau, Kotapraja Pekanbaru.³

Berdasarkan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 nomor 258/M/1958 diangkat Mr. S.M. Amin, sebagai Gubernur pertama provinsi Riau yang dilantik pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang yang sebelum menjadi ibukota dari provinsi Riau.

Kemudian berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25, pada tanggal 20 Januari 1959, Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Riau menggantikan Kota Tanjung Pinang.

² Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Siak 1901 – 1942*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1991), cet. ke 1, hal. 71-104.

³ Sejarah Riau, hal. 689. Lihat Juga, Ahmad Saragih, *Riau Abad 21*, (Pekabnbaru, PWI Riau, 1999), cet. ke 1, hal. 1.



Pada tahun 2002, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Provinsi Riau juga dimekarkan lagi atas 2 provinsi yaitu Riau dan Kepulauan Riau. Sehingga wilayah administrasi Provinsi Riau selanjutnya adalah dikurangi dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sekarang.

Riau adalah sebuah propinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini termasuk salah satu provinsi makmur di Indonesia, dengan *gross regional product* per kapita sebesar USD 7.886 (2008)

Propinsi Riau berada pada alur perdagangan internasional (Selat Malaka) berhadapan dengan negara singapura dan Malaysia. Di sisi lain Propinsi Riau berada pada alur lintas Timur Sumatra yang merupakan batas Propinsi Riau dengan Propinsi Jambi.⁴

B. Keadaan Geografis dan Pemerintahan

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Keberadaan wilayah Provinsi Riau terletak antara berbatasan langsung dengan 4 Provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.⁵

⁴ Sejarah Riau, *op cit.*, hal. 689. Lihat Juga, Ahmad Saragih, *Riau Abad 21*, (Pekaqnbaru, PWI Riau, 1999), cet. ke 1, hal. 1.

⁵ *Riau Dalam Angka Tahun 2010*, (Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, tahun 2010), hal. 2.

Letak wilayah Provinsi Riau berbentuk memanjang dari arah utara ke selatan ditengahnya terbentang Bukit Barisan dan dialiri sungai-sungai yang bermuara di Selat Malaka. Luas wilayah Provinsi Riau adalah $\pm 107.932,71$ Km² yang terdiri dari daerah lautan seluas 18.782,55 Km² (17,40%) dan daerah daratan seluas 89.150,16 Km² (82,60%). Wilayah daerah Provinsi Riau terbagi menjadi 12 wilayah kabupaten/kota yang secara terperinci nama ibu kota dan luas wilayah per kabupaten/kota.

Wilayah kabupaten/kota yang paling luas adalah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah seluas 1.379.837 Ha atau 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau, yang kedua Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayahnya seluas 1.240.414 Ha atau 13,91% dari luas wilayah Provinsi Riau, dan yang ketiga Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 1.092.820 Ha atau 12,26 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Untuk mendukung sarana transportasi melalui air, wilayah Provinsi Riau terdapat 15 sungai di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan dengan kedalaman antara 6 meter sampai 12 meter yaitu:

- a. Sungai Siak, panjang 300 Km, dengan kedalaman 8-12 meter
- b. Sungai Rokan, panjang 400 Km, dengan kedalaman 6-8 meter
- c. Sungai Kampar, panjang 400 Km, dengan kedalaman 6 meter
- d. Sungai Indragiri, panjang 500 Km, dengan kedalaman 6-8 meter.⁶

Provinsi Riau terletak pada $1^{\circ} 31'-2^{\circ} 25'$ LS dan $100^{\circ} -105$ BT, $6^{\circ} 50'-1^{\circ} 45$ BB. Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km². dengan iklim tropis basah dan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160

⁶ *Ibid*, hal. 4



hari..Provinsi Riau memiliki beberapa pulau besar dan pulau kecil lainnya yang mencapai 1.917 Pulau yang tersebar di sepanjang Selat Malaka.

Berdasarkan data dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00'' Lintang Selatan sampai 02°25'00'' Lintang Utara atau antara 100°00'00'' Bujur Timur-105°05'00'' Bujur Timur.⁷ Adapun luas wilayah 107. 932,71 km² terdiri dari daratan 80,11 % dan lautan/Perairan 19,89.⁸

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Ke empat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.⁹

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1700-3000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Kalau dilihat secara kasat mata Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2011 adalah Kota Pekanbaru 211 kali, Kabupaten Indragiri Hulu 192 hari, Kabupaten Pelalawan 167 kali, Kota Dumai 164 kali, dan Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah hari hujan 142 kali. Jumlah Curah Hujan tertinggi pada tahun 2011 terjadi di Kabupaten Kampar dengan curah hujan sebesar 2.938,0 mm, disusul Kota Pekanbaru

⁷ Lihat lebih lanjut Dalam, *Propinsi Riau Dalam Angka tahun 2016*, (Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau tahun 2016), hal. 5

⁸ Lihat, *Data Annual Propinsi Riau*, (Pekanbaru : Badan Perencanaan Propinsi Riau, 2011), cet. ke 1, hal.2.

⁹ Lihat, *Profil Propinsi Riau*, Tahun 2013.

sebesar 2.404,6 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1.781,5 mm. Selanjutnya menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2011 menunjukkan 27,0 celcius dengan suhu maksimum 34,7 celcius dan suhu minimum 21,7 celcius.¹⁰

Sebagai Provinsi, Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah dengan satu orang Wakil Gubernur. Di dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 organisasi perangkat staf pemerintahan daerah yaitu: Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro yaitu :

Asisten I Bidang Pemerintahan membawahi:

1. Biro Bina Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat
2. Biro Hukum
3. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra membawahi:
4. Biro Ekonomi dan Pembangunan Daerah
5. Biro Kesejahteraan Rakyat
6. Asisten III Bidang Administrasi Umum membawahi:
7. Biro Umum
8. Biro Keuangan
9. Biro Perlengkapan.¹¹

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di samping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota.

Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada pertengahan tahun 2012 terdapat 158 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.739 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 7.930 orang. Dari jumlah tersebut 4.543 adalah pegawai laki-laki dan 3.514 pegawai perempuan.

Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah PNS golongan III paling banyak, yaitu sebesar 5.223 orang, menyusul golongan II sebesar 1.750 orang dan golongan IV sebanyak 1.018 orang, sedangkan sisanya 66 orang adalah pegawai golongan I.¹²

Lebih dari 97 persen PNS di Pemerintah Provinsi Riau memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat SLTA hingga S1. PNS yang berpendidikan SLTA berjumlah 3.202 orang, Diploma III sebanyak 962 orang, Sarjana (S1) 2.463 orang dan Pasca Sarjana 771 orang. Sementara PNS yang berpendidikan dibawah SLTA berjumlah 482 orang.

Selain pendidikan formal, pegawai negeri yang akan duduk di struktural wajib mengikuti pendidikan penjenjangan, mulai dari DIKLATPIM IV sampai

¹² BPS, *op.cit.hal.* 21-22.



DIKLATPIM I. Dari 7.880 orang pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintah Provinsi Riau, sebanyak 1.738 orang telah mengikuti pendidikan penjenjangan. Tingkatan yang paling banyak diikuti adalah DIKLATPIM IV yaitu sebanyak 918 orang dan selanjutnya DIKLATPIM III yang diikuti 508 orang pegawai negeri sipil.

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan, Sosial, Pendidikan dan Agama

Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut prediksi Penduduk 2017 adalah 6.500.971 jiwa, terdiri dari 3.336.874 laki-laki dan 3.164.097 perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.328.461 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga.¹³

Distribusi penduduk menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 1.046.566 jiwa atau sekitar 16,21 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 182.152 jiwa.

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau¹⁴.

Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri

¹³ Lihat, *Statistik Propinsi Riau*, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, tahun 2013. Data diperbaharui tahun 2017.

¹⁴ Riau, Wikipedia Riau, diakses, 14 Nopember 2015.

Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak.

Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Dibukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau.

Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis.

Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

Dalam tradisi Melayu, ada semacam ungkapan "Adat Bersendikan Syarak, dan Syarak Bersendikan Kitabullah".¹⁵ Hal ini menyiratkan bahwa secara langsung atau tidak tradisi kebudayaan melayu tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.

Adat dalam Melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat. Ungkapan atau cap kepada mereka yang "tak tahu adat" atau "tak beradat". Begitu pentingnya sehingga timbul ungkapan

¹⁵ UU Hamidi dan Mukhtar Ahmad, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau*, (Pekanbaru : UIR Press, 1993), cet. ke 1, hal. UU Hamidi dan Mukhtar Ahmad, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau*, (Pekanbaru : UIR Press, 1993), cet. ke 1, hal. 132.

lain, "Biar mati Anak, jangan mati Adat". Ungkapan lainnya adalah: "Biar mati Istri, jangan mati Adat". Semua ungkapan ini Menunjukkan betapa adat-istiadat dalam masyarakat Melayu sangat dijunjung tinggi.¹⁶

"Tak kan Melayu hilang di bumi", adalah keyakinan masyarakat Melayu Riau akan tradisi dan budayanya. Kalimat ini diucapkan secara turun-temurun dan telah mendarah-daging bagi orang Melayu. Sifat masyarakat Melayu yang terbuka menyebabkan terbentuknya tradisi yang majemuk. Tradisi luar masuk ke Kepulauan Riau sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, saat mana budaya Melayu Kuno telah bercampur dengan tradisi Hindu dan Budha.

Akibat perdagangan antar daerah yang berlangsung selama puluhan tahun, masuk pula tradisi Bugis, Banjar, Minang, Jawa dan lain-lain. Semasa masuknya Portugis ke Melaka, datang pula tradisi Sunda mewarnai tradisi Melayu Riau.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan data SP 2010, estimasi penduduk Riau tahun 2010-2020 penduduk Riau berjumlah 6.344.402 jiwa.¹⁷ Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Riau 10,01 persen, dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp.301.190,-. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.

Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha pemerataan penduduk. Hingga tahun 2011, Provinsi Riau masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2011 realisasi penempatan Transmigran di Provinsi Riau adalah 70 kepala keluarga atau 262 jiwa, berasal dari APPDT.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang

¹⁶ Lihat, Mohd. Yunus dkk, *Kerjasama Antar Kelompok Etnik (Studi Tentang Sikap Orang Cina Terhadap Orang Melayu di Propinsi Riau*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2015), hal. 20.

¹⁷ BPS, *op.cit.* hal. 49.

tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2011 (Sakernas 2011) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sementara pada penduduk perempuan, bukan angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Siak dan Pelalawan, masing-masing sebesar 68,28 persen dan 68,14 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Pekanbaru sebesar 64,16 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian, diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel serta jasa-jasa.

Pada tahun 2015, PNS yang menjadi peserta aktif Taspen berjumlah 97.200 orang yang terdiri dari PNS Pusat sebanyak 13.834 orang (14,23 persen), PNS Daerah Otonom sebanyak 85.498 orang (87,96 persen), dan Pejabat Negara sebanyak 25 orang (0,03 persen). Pejabat Negara di setiap wilayah terdapat dua orang yaitu kepala daerah dan wakilnya. Jumlah pensiunan keadaan bulan April 2016 adalah 29.373 orang atau bertambah 1,51 persen dari 28.934 orang pada April 2015. Sementara pembayaran pensiunan yang dilakukan oleh Taspen meningkat 6,32 persen dari tahun sebelumnya.¹⁸

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian

¹⁸ *Ibid*, hal. 50

pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Bila pada tahun 2014 terdapat 64 buah rumah sakit, 211 puskesmas, 933 puskesmas pembantu, 212 puskesmas keliling, pada tahun 2015 jumlah rumah sakit menjadi 69, puskesmas 212 dan puskesmas pembantu 981 dan puskesmas keliling 181. Pada tahun 2014 data jumlah para medis (dokter) 2.203 orang yang terdiri dari 810 spesialis, 1.137 dokter umum dan 356 dokter gigi. Data tahun 2015 menunjukkan jumlah para medis (dokter) 2.4496 orang yang terdiri dari 881 spesialis, 1254 dokter umum dan 361 dokter gigi.¹⁹

Guna menanggulangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak tahun 70-an melaksanakan program Keluarga Berencana. Tujuan Keluarga Berencana adalah tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran. Pada tahun 2015 Propinsi Riau terdapat 169.329 akseptor KB baru dan 794.527 akseptor KB aktif.²⁰

Statistik Peradilan yang disajikan dalam sub bab ini dikumpulkan dari:

1. Pengadilan Tinggi Riau
2. Polisi Daerah Riau

Banyaknya perkara perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau tahun 2015 tercatat gugatan yang masuk 744 perkara dan permohonan sebanyak 758 perkara sedangkan perkara pidana dalam tahun yang sama tercatat 5.883 perkara

¹⁹ *Ibid.* hal. 104.

²⁰ *Ibid.*

biasa, 12 perkara singkat, 106.171 perkara lalu lintas,²¹ 23 perkara korupsi dan 91 perkara narkotika.

Guna mengarahkan kehidupan beragama untuk amal dan kepentingan bersama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan dari Kanwil Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2015 di Provinsi Riau terdapat 10.519 masjid dan 1.549 gereja.²²

Data tahun 2011 menunjukkan angka bencana alam yang terjadi di Provinsi Riau yang mengakibatkan 7.669 orang menderita dan 315 rumah hancur. Sedangkan jumlah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk beras adalah sebesar 28.200 kg.

D. Industri, Pertambangan, Air Minum, Energi, dan Perdagangan Luar Negeri

Data statistik yang disajikan dalam bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub sektor, yaitu:

1. Industri

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Riau. Pada tahun 2014 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Riau sebanyak 219 perusahaan.

Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (10) yaitu sebanyak 167 perusahaan, diikuti kelompok Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik (22) sebanyak 13 perusahaan.

Pada tahun 2014, Industri Besar dan Sedang di Provinsi Riau menyerap tenaga kerja sebanyak 61.468 orang dengan pengeluaran untuk pekerja sebesar 2.767,39 milyar rupiah. Nilai output pada industri besar dan sedang tahun 2014 sebesar

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*



215.874,36 milyar rupiah dengan biaya input yang dikeluarkan sebesar 107.151,85 milyar rupiah. Nilai produksi barang yang dihasilkan perusahaan industri besar dan sedang mencapai 108,722,50 milyar rupiah. Nilai produksi terbesar juga dihasilkan oleh sub sektor industri makanan (10) sebesar 99.158,90 milyar rupiah.

Produksi Minyak Bumi di Provinsi Riau, pada tahun 2015 sebanyak 83,03 juta barel. Di samping minyak mentah, sumber daya alam yang potensi lainnya adalah gambut dan batubara. Produksi minyak di Riau dari tahun ke tahun terus menurun.²³

Air minum ataupun air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah Perusahaan Air Minum menjadi 19 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum 1.943 liter per detik.

Produksi air minum yang di salurkan pada tahun 2010 sebesar 28,06 juta m³, sejumlah 6,61 juta m³ (23,54 persen) di distribusikan ke kelompok Non Niaga yaitu rumah tangga dan instansi pemerintah, 8,62 juta m³ (30,73 persen) ke kelompok Niaga, 0,20 juta m³ (0,70 persen) ke kelompok sosial, 0,24 juta m³ (0,84 persen) ke kelompok industri dan 3,98 juta m³ (14,18 persen) ke kelompok khusus. Sedangkan air minum yang susut/hilang dalam penyaluran sebesar 8,43 juta m³ (30,02 persen).²⁴

Energi

Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik.

²³ Bps, *Ibid*, 291.

²⁴ *Ibid*.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik wilayah Riau tahun 2011 sebesar 201.562 KW dan tenaga yang dibangkitkan sebesar 442.218.066 KWH. Jumlah pelanggan PLN tahun 2011 sebanyak 743.502, sebesar 88,11 persen merupakan pelanggan rumah tangga.

²⁵ Dalam bidang konstruksi, berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat dan teratur. Data konstruksi ini hanya terbatas pada pembangunan rumah dengan fasilitas KPR BTN. Pada tahun 2011 pengembang swasta telah membangun 4.287 unit perumahan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota Provinsi Riau. Kabupaten/Kota yang terbanyak dibangun perumahan adalah Kota Pekanbaru sebanyak 2.119 unit, diikuti Kabupaten Kampar sebanyak 1.502 unit dan sisanya di Kabupaten Pelalawan, Dumai dan Bengkalis sebanyak 134, 243 dan 237 unit.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, banyaknya rumah yang dibangun pengembang swasta melalui KPR BTN mengalami kenaikan lebih dari 16 persen.

Statistik perdagangan luar negeri meliputi barang yang diekspor ke luar negeri dan yang diimpor dari luar negeri melalui wilayah Provinsi Riau. Salah satu sumber alam Riau yang cukup berperan menunjang ekspor negara kita adalah minyak bumi dan hasil tambang lainnya. Ekspor Provinsi Riau tahun 2011 termasuk minyak bumi tercatat sebesar US \$ 20.139,98 juta.

Perkembangan ekspor Riau dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 cukup baik yaitu tahun 2004 US \$ 5.680,22 juta, menjadi US \$ 20.139,98 juta pada tahun 2011. Dibanding tahun 2010, nilai ekspor tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 35,25 persen. Sementara itu nilai ekspor Riau terbesar dimuat pada pelabuhan Dumai yaitu sebesar US \$ 16.485,32 juta (81,85 persen), pelabuhan Buatan sebesar US \$

²⁵ *Ibid.*

1.422,76 juta (7,06 persen) dan pelabuhan Perawang sebesar US \$ 1.055,26 juta (5,24 persen).²⁶

Dalam bidang impor Nilai impor Riau terbesar pada tahun 2011 melalui pelabuhan Dumai sebesar US \$ 1.175,18 juta (57,62 persen), pelabuhan Perawang sebesar US \$ 405,33 juta (19,87 persen), disusul pelabuhan Buatan sebesar US \$ 262,65 juta (12,88 persen) dan sisanya sebanyak US \$ 196,23 juta (9,62 persen) melalui pelabuhan-pelabuhan lainnya. Nilai impor provinsi Riau menurut negara asal pada tahun 2011 yang terbesar dari Negara Singapura dengan nilai impor US \$ 505,51 juta (24,79 persen), Malaysia sebesar US \$ 327,61 juta (16,06 persen) dan China sebesar US \$ 265,60 juta (13,02 persen).²⁷

E. Transportasi dan Komunikasi dan Pariwisata Keuangan dan Koperasi

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2011, panjang jalan 4.167,78 km, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya namun data kabupaten/ kota tidak tersedia. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.102,06 km (26,44 persen), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 1.547,24 km (37,12 persen), dan 36,43 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Jumlah jembatan pada tahun 2011 sebanyak 1.012 unit. Sementara jumlah jembatan menurut konstruksinya, 302 unit jembatan beton, 474 unit jembatan komposit, 85 unit jembatan kayu dan 151 unit jembatan rangka.

Pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan ini dapat mendukung pelaksanaan Pekan Olah raga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 di Riau. Pada tahun 2011, pengiriman surat melalui kantor pos di Provinsi Riau sejumlah 180.360 surat, sementara penerimaan surat sejumlah 461.159 surat.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Sebagian besar surat tersebut dikirim dan diterima melalui Kantor Pos Pekanbaru, yaitu 83,25 persen pengiriman dan 89,06 persen penerimaan. Jumlah pengiriman surat tercatat tahun 2011 sebanyak 408.718 paket, terdiri dari 404.975 paket dalam negeri dan 3.743 paket luar negeri.²⁸

Pada tahun 2010 jumlah akomodasi hotel sebanyak 362 unit yang tersebar di kabupaten/kota di provinsi Riau. Terbanyak terdapat di kota Pekanbaru, 95 unit atau sekitar 26,24 persen. Adapun jumlah kamar dan tempat tidur tersedia sebanyak 10.799 kamar dan 17.103 tempat tidur. Di kota Pekanbaru, tersedia 4.615 kamar (42,74 persen) dan 6.768 tempat tidur (39,57 persen). Jumlah tamu asing atau wisman yang berkunjung ke Provinsi Riau pada tahun 2011 sebanyak 47.877 orang. Tamu asing tersebut datang ke provinsi Riau melalui pintu masuk utama kota Pekanbaru 52,69 persen atau 25.227 orang. Sebagian besar tamu asing yakni 81,29 persen berasal dari negara-negara ASEAN dan 8,60 persen berasal dari negara Asia.

Data statistik keuangan pada bab ini dibagi menjadi 5 (tiga) sub bab, yaitu:

Keuangan daerah, Dalam perencanaan Anggaran dan Belanja Negara, pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Jumlah anggaran menurut urusan pemerintahan daerah tahun 2011 berjumlah 4.790,20 milyar rupiah, dimana bidang otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diberikan sebesar 1.739,20 milyar rupiah, disusul bidang pekerjaan umum sebesar 951,53 milyar rupiah dan bidang kepemudaan dan olahraga sebesar 706,77 milyar rupiah.

Di sisi lain, realisasi penerimaan Provinsi Riau tahun 2011 berjumlah 5.440,44 milyar rupiah. Dibanding dengan realisasi penerimaan Provinsi Riau 2010 yang berjumlah 4.305,47 milyar rupiah meningkat 26,36 persen. Realisasi pengeluaran

²⁸ *Ibid.*



Provinsi Riau 2011 berjumlah 4.265,13 milyar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1.726,94 milyar rupiah dan belanja langsung sebesar 2.538,19 milyar rupiah. Penerimaan Provinsi Riau dari pajak penghasilan, PPn, PPn BM dan pajak lainnya, pajak bumi bangunan (PBB) serta BPHTB cukup tinggi, yaitu sebesar 9,17 triliun rupiah pada tahun 2011. Secara rinci penerimaan PBB sebesar 1,89 triliun rupiah, pajak penghasilan sebesar 4,89 triliun rupiah, PPn dan PPn BM sebesar 2,30 triliun rupiah dan pajak lainnya 0,77 triliun rupiah.

Perbankan Pada akhir tahun 2011 di Riau terdapat 671 buah Kantor Bank (tidak termasuk Bank Indonesia) yang terdiri dari :

1. Kantor Pusat 34 buah
2. Kantor Cabang 90 buah
3. Kantor Cabang Pembantu 384 buah
4. Kantor Kas 70 buah
5. Lainnya 93 buah.²⁹

Pengeralahan dana masyarakat melalui perbankan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan. Pada tahun 2011, jumlah dana dari masyarakat yang berhasil dihimpun meningkat 21,74 persen dari tahun 2010. Dana dari masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan pada akhir tahun 2011 berjumlah 44,88 triliun rupiah yang terdiri dari giro sebesar 10,61 triliun rupiah, deposito 11,90 triliun rupiah dan tabungan 22,37 triliun rupiah.

Beda halnya dengan dana yang dihimpun dari masyarakat, jumlah kredit yang disalurkan bank mengalami peningkatan pada tahun 2011, yaitu dari 42,38 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 51,09 triliun rupiah pada tahun 2011 atau meningkat 20,55 persen. Kredit perbankan tersebut sebesar 19,39 triliun rupiah disalurkan

²⁹ *Ibid.*

untuk modal kerja, sebesar 14,39 triliun rupiah untuk investasi dan sebesar 17,31 triliun rupiah untuk konsumsi. Jika dilihat dari sektor ekonomi, kredit perbankan tersebut digunakan untuk perindustrian 5,32 triliun rupiah, pertanian 10,47 triliun rupiah, sektor perdagangan 9,98 triliun rupiah dan sektor lainnya 17,31 triliun rupiah.

Inflasi di Pekanbaru pada akhir tahun 2011 (Desember 2011 dengan tahun dasar 2007=100) tercatat inflasi umum sebesar 0,69 persen, bahan makanan 2,31 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,33 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,27 persen, sandang sebesar -0,32 persen, kesehatan sebesar -0,10 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,00 persen dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.³⁰

Indeks harga konsumen di Pekanbaru pada akhir 2011 (bulan Desember 2011 dengan tahun dasar 2007=100) tercatat dengan rincian: untuk indeks umum 129,35; bahan makanan tercatat 149,66; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat 138,65; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 121,19; sandang 140,92; kesehatan 119,46; pendidikan, rekreasi dan olah raga tercatat 129,61 dan untuk transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat sebesar 102,71.

Nilai Rata-rata Tukar Petani (NTP) Riau tahun 2011 (tahun dasar 2007 = 100) untuk tanaman pangan 113,67; tanaman hortikultura tercatat 118,04; tanaman perkebunan rakyat 101,15; peternakan 101,05; perikanan 92,21. Sedangkan secara umum rata-rata NTP 2011 tercatat 105,75 dengan Indeks Harga yang diterima Petani 142,67 dan Indeks Harga yang Dibayar 134,91.

Jumlah Koperasi Perkotaan di Riau tahun 2012 tercatat 5.013 buah dengan anggota sebanyak 608.468 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi pada

³⁰ *Ibid.*

tahun 2011, jumlah koperasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 4,61 persen sedangkan jumlah anggotanya mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Dari 5.013 buah koperasi tersebut memiliki volume usaha sebesar 2,35 triliun rupiah dan SHU sebesar 0,13 triliun rupiah.³¹

Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah data konsumsi kalori dan protein per kapita. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein per kapita sehari. Menurut Widya Pangan dan Gizi (1988) norma kecukupan gizi yang dianjurkan per kapita per hari adalah penyediaan energi 2.500 kalori dan protein 55 gram. Di samping itu FAO (Food and Agriculture Organization) menganjurkan bahwa bagi Indonesia untuk mencapai kecukupan gizi yang seimbang dapat digunakan pola penyediaan pangan harapan dengan kecukupan energi dari padi-padian 50 persen, umbi-umbian 5 persen, pangan hewani 15-20 persen, lemak dan minyak 10 persen, biji berminyak/ kacang-kacangan 8 persen, gula 6-7 persen dan sayur-sayuran 5 persen.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS dapat dilihat gambaran secara umum mengenai konsumsi kalori dan protein. Untuk tahun 2010 rata – rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk Propinsi Riau adalah 1.903,59 kalori dan rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menunjukkan angka 55,05 gram.

Secara umum, gambaran mengenai konsumsi kalori dan protein pada tahun 2010 menunjukkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009

³¹ *Ibid.*



rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di Propinsi Riau menunjukkan angka 1.932,53 gram dan rata-rata protein per kapita sehari menunjukkan angka 54,74 gram.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan dapat di lihat bahwa pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Riau di daerah kota pada tahun 2010 telah mencapai 718.711 rupiah sedangkan di daerah pedesaan baru mencapai 475.375 rupiah atau hanya sebesar 66,14 persen pengeluaran rata-rata masyarakat kota. Secara keseluruhan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Riau diperkirakan 598.014 rupiah.

Pada tahun 2010 persentase pengeluaran makanan terhadap seluruh pengeluaran di Riau masih cukup tinggi yaitu sekitar 52,95 persen. Selain itu perbedaan pengeluaran untuk makanan di daerah kota dengan daerah pedesaan masih cukup tinggi. Persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kota hanya sekitar 49,61 persen sedangkan di daerah pedesaan 58,09 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kehidupan penduduk kota cenderung kepada pengeluaran bukan makanan, sedangkan penduduk pedesaan lebih cenderung untuk makanan.

Hingga kini alat untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah secara tepat sulit ditemukan, namun secara tidak langsung, salah satu ukuran yang dianggap dapat mendekati pencapaian kemakmuran tersebut yakni dengan menggunakan angka pendapatan regional.

Manfaat pendapatan regional antara lain adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian pada suatu periode di suatu daerah tertentu.

Dari hasil penghitungan PDRB Riau yang telah dilakukan oleh BPS Riau dapat disajikan angka-angka pendapatan regional secara seri dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2011 dalam bab ini disajikan seris data 5 tahunan dari tahun 2007-2011.

Produk Domestik Regional Bruto Pertumbuhan ekonomi dunia cenderung terus membaik yang secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tentu saja termasuk Riau. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, maka telah terjadi kenaikan dari 214,55 triliun rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 253,39 triliun rupiah pada tahun 2011. Demikian pula angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas tahun 2011 mencapai sebesar 52,36 triliun rupiah yang lebih tinggi dari tahun 2010 yakni sebesar 48,64 triliun rupiah.

Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas menunjukkan peningkatan dari 345,66 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 413,35 triliun rupiah pada tahun 2011. Peningkatan tersebut juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan migas, dari 97,70 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 102,61 triliun rupiah pada tahun 2011.

Pendapatan Regional Per Kapita Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan regional per kapita Riau termasuk migas atas dasar harga berlaku adalah sebesar 65,85 juta rupiah tahun 2011 lebih besar dari angka tahun 2010 sebesar 57,06 juta rupiah. Begitu juga dengan pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan 2000, tahun 2010 sebesar 16,13 juta rupiah kemudian naik menjadi 16,35 juta rupiah pada tahun 2011.

Sementara itu bila diamati pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku juga terjadi peningkatan dari tahun 2010 sebesar 35,42 juta rupiah



menjadi 40,37 juta rupiah pada tahun 2011, demikian pula bila diamati atas dasar harga konstan 2000 telah terjadi peningkatan dari 8,03 juta rupiah di tahun 2010, kemudian naik menjadi 8,34 juta rupiah pada tahun 2011.

F. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Luas lahan di Provinsi Riau berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Luas lahan basah Provinsi Riau menjadi 829.914,33 hektar dari 87.347,72 hektar pada tahun 2010 dan luas lahan kering mencapai 274.779,38 dari 3.676.348,31 hektar pada tahun sebelumnya.³²

1. Pertanian

Data statistik pertanian yang disajikan dalam bab ini terbagi dalam 5 sub sektor yaitu:

Pertanian Tanaman Pangan, Sub sektor tanaman pangan terdiri dari tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selama periode 2011 luas panen tanaman padi mengalami sedikit penurunan sebesar 7,47 persen yaitu dari 156.088 hektar menjadi 145.242 hektar. Panen padi sawah terluas di Kabupaten Rokan Hilir, sementara panen padi ladang terluas di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2011 ini, produksi tanaman padi sebesar 535.788 ton, terdiri dari 481.911 ton padi sawah dan 53.877 ton padi ladang.

2. Perkebunan,

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang

³² Lihat, Laporan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010.

merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh.

Data luas dan produksi tanaman perkebunan tahun 2011 yang dikumpulkan dari Dinas Perkebunan menunjukkan adanya perubahan luas areal tanaman pada komoditi kelapa sawit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit 2.256.538 hektar, kelapa 521.019 hektar, karet 498.907 hektar dan kopi 4.725 hektar dengan produksi tanaman kelapa sawit 6.932.572 ton, kelapa 470.370 ton, karet 344.538 ton dan kopi 2.107 ton.³³

3. Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ternak pada tahun 2011 tercatat: sapi 164.707 ekor, kerbau 38.300 ekor, sapi perah 180 ekor, kambing 196.115 ekor, domba 3.985 ekor, dan babi 47.449 ekor.

Informasi lain yang diperoleh dari Dinas Peternakan adalah jumlah ternak yang dipotong. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 47.838 ekor sapi, 6.598 ekor kerbau, 41.083 ekor kambing, 391 ekor domba dan 21.722 ekor babi. Sementara itu produksi daging sapi tahun 2011 sebesar 8.773 ton. Sedangkan produksi telur pada tahun 2011 sebanyak 4.161.488 butir yang berasal dari ayam petelur, ayam kampung dan itik.

4. Perikanan

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada tahun 2011, dari sejumlah 195.194,7 ton total produksi ikan, sebanyak 90.505,3 ton

³³ Lihat, *Profil Perkebunan Propinsi Riau*, (Pekanbaru : Dinas Perkebunan Propinsi Riau, tahun 2013), hal. 6-7.

531.852,65 hektar (6,19 persen) adalah hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39 hektar (49,75) merupakan hutan produksi konversi.³⁷

Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan di Provinsi Riau pada tahun 2011 tercatat seluas 1,2 juta hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir 237.157,08 hektar atau 18,91 persen diikuti Kabupaten Kampar seluas 190.832,82 hektar atau 15,22 persen dan Kabupaten Bengkalis seluas 151.149,12 hektar atau 12,05 persen.³⁸

Meningkatnya jumlah penduduk menandung konsekuensi meningkatnya kebutuhanakan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam danselanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan/kawasan hutan yang ada. Hal inilah yang membuka peluang munsulnya konflik maupunsenketa yang berkaitan dengan tanah kawasan hutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Lihat, *Profil Kehutanan Propinsi Riau*, (Pekanbaru, Dinas Kehutanan Propinsi Riau, tahun 2013).

³⁸ *Ibid.*